

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Untuk memperkuat landasan penelitian, peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Tinjauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi temuan, pendekatan, serta fokus kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sekaligus menemukan persamaan dan perbedaan dengan yang diteliti oleh peneliti. Dengan demikian, penelitian ini menjadi jelas, baik dalam segi kontribusi keilmuan, maupun kebaruan penelitian. Adapun perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Hasil	Relevansi
1.	<p>Judul : The Role of Village Government in the Environmental Restoration After Sidoarjo Mudflow Disaster.</p> <p>Penulis : Mursyidah et al. (2025)</p>	<p>Penelitian ini meneliti peran pemerintah desa Ketapang dalam pemulihan ekosistem lingkungan setelah bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo. Pemerintah desa Ketapang menjalankan peran penting sebagai stabilizer, innovator, modernizer, pioneer, dan implementer dalam kegiatan pembangunan pasca bencana. Mereka melibatkan berbagai pihak seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, mahasiswa, Babinsa, Babinkamtibmas, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo.</p>	<p>Persamaan : Penelitian ini dengan penelitian saya sama-sama mengangkat dampak bencana Lumpur Lapindo di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin. Keduanya menyoroti bahwa bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga berdampak panjang terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya.</p> <p>Perbedaan : Penelitian Lailatul Mursyidah dkk. berfokus pada peran pemerintah desa Ketapang dalam proses pemulihan ekosistem lingkungan, sedangkan penelitian saya berfokus pada kerentanan sosial masyarakat setelah bencana terjadi.</p>
2.	<p>Judul : Kehidupan Masyarakat Korban Lumpur Lapindo</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat korban Lumpur Lapindo di Kecamatan Porong</p>	<p>Persamaan : Penelitian ini dengan penelitian saya sama-sama melihat tentang bagaimana dampak jangka panjang</p>

<p>Selama 14 Tahun (2006-2020) di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo</p> <p>Penulis : Bagus Wibowo Kusumo (2022)</p>	<p>mengalami berbagai perubahan sosial selama 14 tahun pasca bencana. Perubahan tersebut meliputi perubahan adat istiadat, pergeseran mata pencaharian dari sektor pertanian ke pekerjaan lain, perubahan kondisi ekonomi, serta perubahan pola pikir masyarakat dalam menghadapi kehidupan setelah bencana. Temuan ini dianalisis menggunakan Teori AGIL Talcott Parsons, yang menjelaskan bagaimana masyarakat beradaptasi, mempertahankan integrasi sosial, dan menyesuaikan sistem kehidupannya agar dapat bertahan dalam kondisi pasca bencana.</p>	<p>yang ditimbulkan setelah bencana Lumpur Lapindo ini terjadi dan keduanya juga menyoroti perubahan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pola pikir masyarakat. Penelitian ini juga sama-sama berawal dari upaya untuk memahami bagaimana masyarakat mampu beradaptasi dan mempertahankan kehidupan setelah terjadi bencana.</p> <p>Perbedaan : Perbedaan keduanya terletak pada lokasi dan rentang waktu yang berbeda. Penelitian Bagus W. Kusumo dilakukan di Kec. Porong dengan rentang waktu 14 tahun (2006-2020), sedangkan penelitian saya dilakukan di Desa Ketapang, Kec. Tanggulangin dengan rentang waktu 19 tahun (2006-2025).</p>
<p>Judul : Kerentanan sosial-ekologi perubahan iklim di Wilayah Pesisir Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang</p> <p>3.</p> <p>Penulis : Anugrah (2023)</p>	<p>Hasil penelitian Anugrah (2023) menunjukkan bahwa perubahan iklim di wilayah pesisir Kelurahan Bandarharjo meningkatkan kerentanan sosial-ekologi masyarakat, yang ditandai dengan kerusakan infrastruktur, menurunnya kualitas lingkungan dan kesehatan, serta kerentanan pada aspek ekonomi seperti mata pencaharian, pendapatan, dan aset. Meskipun pemerintah telah berperan dalam penanggulangan bencana pada tahap pra, saat, dan pasca kejadian, masyarakat tetap menghadapi tekanan yang tinggi dan cenderung memilih bertahan dengan melakukan berbagai bentuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi.</p>	<p>Persamaan : Penelitian ini dan penelitian saya sama-sama menyoroti dampak kerentanan, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun kondisi kehidupan masyarakat. Dan keduanya juga melihat bagaimana masyarakat merespons kondisi tersebut melalui berbagai bentuk adaptasi untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya di tengah tekanan lingkungan.</p> <p>Perbedaan : Penelitian Anugrah (2023) berfokus pada kerentanan sosial-ekologi akibat perubahan iklim di wilayah pesisir Kelurahan Bandarharjo, dengan pendekatan sistem sosial-ekologi. Sementara itu, penelitian saya lebih menitikberatkan pada kerentanan sosial masyarakat korban bencana lumpur Lapindo.</p>
<p>Judul : Kajian tingkat kerentanan sosial terhadap masyarakat terdampak bencana di Kecamatan</p> <p>4.</p>	<p>Penelitian Maulidin (2022) menunjukkan bahwa tingkat kerentanan sosial pasca gempa Pidie Jaya 2016 bervariasi antar desa di Kecamatan Trienggadeng, dengan Desa</p>	<p>Persamaan : Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian saya karena sama-sama mengkaji kerentanan sosial masyarakat pascabencana serta melihat faktor-faktor yang</p>

<p>Trienggadeng pasca gempa bumi Pidie Jaya 2016</p> <p>Penulis : Maulidin et al., (2022)</p>	<p>Tampui berada pada kategori tinggi, sementara desa lainnya tergolong rendah. Faktor utama yang memicu kerentanan meliputi tingkat kemiskinan, kepadatan penduduk, dan pengelolaan sampah. Meskipun demikian, terjadi peningkatan dalam kualitas dan akses terhadap sanitasi serta layanan kesehatan pada periode 2016–2021.</p>	<p>memengaruhi tingkat kerentanan tersebut dalam kehidupan masyarakat.</p> <p>Perbedaan : Hasil penelitian Maulidin (2022) dan penelitian saya menunjukkan bahwa keduanya memiliki topik lokasi yang berbeda.</p>
<p>5. Judul : Kajian Kerentanan Sosial Penduduk Pulau Pasaran Terhadap Bencana Banjir Rob</p> <p>Penulis : Huns, (2023)</p>	<p>Penelitian Danis (2023) menunjukkan bahwa tingkat kerentanan sosial masyarakat Pulau Pasaran terhadap banjir rob tergolong tinggi. Faktor yang paling berpengaruh adalah kepadatan penduduk dan rasio jenis kelamin. Meskipun tingkat ancaman banjir berada pada kategori sedang, tingginya kerentanan sosial membuat masyarakat tetap berada pada kondisi berisiko tinggi terhadap dampak banjir rob.</p>	<p>Persamaan : Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian saya karena sama-sama mengkaji kerentanan sosial masyarakat akibat tekanan bencana, serta menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kerentanan dalam kehidupan masyarakat.</p> <p>Perbedaan : Kedua penelitian juga memiliki lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian Danis (2023) dilakukan di wilayah pesisir, yaitu Pulau Pasaran, Bandar Lampung, yang memiliki karakteristik kerentanan akibat banjir rob dan kondisi geografis kepulauan. Sementara itu, penelitian saya dilakukan di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, yang mengalami kerentanan sosial akibat bencana lumpur Lapindo.</p>
<p>5. Judul : Perubahan Sosial Ekonomi Pasca Bencana Lumpur Lapindo di Sentra Kerajinan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo</p> <p>Penulis : Ajeng et al. (2024)</p>	<p>Penelitian Putri Ajeng Dwi Cahyani dan Fulia Aji Gustaman (2024) menunjukkan bahwa bencana lumpur Lapindo berdampak signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya melemahkan sektor industri kecil seperti kerajinan tas di Tanggulangin. Namun, para pelaku usaha tidak sepenuhnya terpuruk karena secara bertahap mampu bangkit dan menata kembali usahanya sebagai sumber penghidupan utama masyarakat.</p>	<p>Persamaan : Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian saya karena sama-sama mengkaji dampak bencana lumpur Lapindo terhadap kehidupan masyarakat, khususnya perubahan yang terjadi setelah bencana, baik dari sisi sosial maupun ekonomi.</p> <p>Perbedaan : Hasil penelitian tersebut lebih menekankan pada dampak ekonomi dan proses pemulihan sektor usaha</p>

masyarakat, khususnya kebangkitan industri kerajinan tas. Sementara itu, penelitian saya menunjukkan bahwa dampak bencana tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi lebih luas mencakup kerentanan sosial yang kompleks.

6. **Judul :**
Kondisi Sosial
Ekonomi
Masyarakat Korban
Bencana Lumpur
Lapindo Pada
Kawasan
Permukiman Di
Desa Pangreh
- Penulis :**
Moch Shofwan
(2023)
- Penelitian Moch Shofwan (2023) menunjukkan bahwa kondisi sosio-ekonomi masyarakat korban lumpur Lapindo di Desa Pangreh relatif stabil dari segi fasilitas, seperti pendidikan dan kesehatan yang sudah memadai. Namun, secara ekonomi sebagian besar masyarakat berada pada tingkat menengah ke bawah dan mengalami dampak negatif relokasi, seperti kehilangan pekerjaan. Di sisi lain, terdapat juga dampak positif yang dirasakan oleh sebagian warga, serta kondisi sosial masyarakat yang masih tergolong kuat dengan tetap terjaganya kegiatan dan tradisi sosial.
- Persamaan :**
Keduanya sama-sama mengkaji kondisi masyarakat korban lumpur Lapindo pascabencana, khususnya terkait dampak sosial dan ekonomi yang dialami.
- Perbedaan :**
Penelitian Shofwan lebih menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat masih relatif kuat dan fasilitas dasar sudah memadai meskipun ekonomi menurun, sedangkan penelitian saya menemukan bahwa kerentanan sosial lebih kompleks dan mendalam.

7. **Judul :**
Kehidupan
Masyarakat Korban
Lumpur Lapindo
Selama 14 Tahun
(2006-2020) di
Kecamatan Porong
Kabupaten Sidoarjo
- Penulis :**
Kusumo (2022)
- Penelitian Bagus Wibowo Kusumo (2022) menunjukkan bahwa selama 14 tahun pascabencana lumpur Lapindo, masyarakat di Kecamatan Porong mengalami berbagai perubahan sosial yang signifikan, meliputi perubahan adat istiadat, mata pencaharian, kondisi ekonomi, serta pola pikir masyarakat. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh proses adaptasi masyarakat terhadap kondisi baru pascabencana.
- Persamaan :**
Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian saya karena sama-sama mengkaji dinamika sosial masyarakat korban lumpur Lapindo dalam jangka waktu panjang dengan pendekatan kualitatif.
- Perbedaan :**
Penelitian Kusumo lebih menekankan pada bentuk perubahan sosial yang terjadi secara umum, seperti perubahan budaya, ekonomi, dan pola pikir masyarakat. Sementara itu, penelitian saya lebih menyoroti kerentanan sosial secara mendalam pasca bencana.

8. **Judul :**
Pemetaan
Kerentanan Fisik,
Sosial Dan Ekonomi
Akibat Bencana
Gunung Api Slamet
- Penulis :**
NURULALAM &
HANDIANI (2023)
- Penelitian Nurulalam dan Handiani (2023) menunjukkan bahwa tingkat kerentanan terhadap bencana Gunung Api Slamet bervariasi pada aspek fisik, sosial, dan ekonomi di wilayah terdampak. Kerentanan sosial mendominasi dengan kategori tinggi di sebagian besar kecamatan, diikuti oleh kerentanan fisik yang juga cukup tinggi, sementara kerentanan ekonomi cenderung lebih rendah dibandingkan aspek lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sosial menjadi aspek paling rentan dalam menghadapi potensi bencana gunung api.
- Persamaan :**
Keduanya sama-sama mengkaji kerentanan sosial dalam konteks bencana serta melihat faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kerentanan yang terjadi pada masyarakat.
- Perbedaan :**
Penelitian ini menunjukkan kerentanan sosial sebagai bagian dari pemetaan wilayah yang bersifat umum dan komparatif antar kecamatan, sedangkan penelitian saya menunjukkan kerentanan sosial yang lebih spesifik dan mendalam pada masyarakat korban lumpur Lapindo, dengan fokus dampak jangka panjang yang dirasakan masyarakat.
-
9. **Judul :**
Kerentanan
Masyarakat
Terhadap Bencana
Banjir Danau di
Desa Melintang
Kecamatan Muara
Wis Kabupaten
Kutai Kartanegara
- Penulis :**
Anwar (2022)
- Penelitian Anwar et al. (2022) menunjukkan bahwa tingkat kerentanan masyarakat Desa Melintang terhadap banjir danau. Faktor yang paling berpengaruh dalam meningkatkan kerentanan adalah aspek kelembagaan, sedangkan aspek fisik, sosial, dan ekonomi tidak terlalu dominan. Meskipun demikian, masyarakat telah memiliki upaya adaptasi sehingga tetap mampu bertahan di wilayah rawan banjir.
- Persamaan :**
Keduanya sama-sama mengkaji kerentanan masyarakat akibat bencana serta melihat faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan masyarakat dalam bertahan dan beradaptasi.
- Perbedaan :**
Penelitian Anwar et al. menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memiliki tingkat kerentanan sedang dan sudah memiliki kapasitas adaptasi yang cukup baik, terutama karena faktor sosial dan ekonomi tidak terlalu memperburuk kondisi. Sementara itu, penelitian saya menunjukkan bahwa kerentanan sosial pada masyarakat korban lumpur Lapindo lebih kompleks dan cenderung berkelanjutan, ditandai dengan ketimpangan pemulihan.
-
10. **Judul :**
RELOKASI
WARGA
TERDAMPAK
LUMPUR
LAPINDO DI
- Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi pascabencana lumpur Lapindo dilakukan secara bertahap (2007–2012) di beberapa lokasi seperti Kahuripan Nirwana, Renojoyo, dan Pangreh.
- Persamaan :**
Keduanya membahas dampak pascabencana lumpur Lapindo pada masyarakat yang terdampak, dan sama-sama menemukan adanya perubahan mata pencaharian serta perubahan kehidupan sosial.
-

DESA JATIREJO
2006-2012

Penulis :
Shevita & Artono
(2025)

Relokasi memberikan dampak positif berupa hunian yang lebih permanen serta akses fasilitas umum yang lebih baik. Namun, di sisi lain, relokasi juga menimbulkan dampak negatif, seperti hilangnya identitas lokal, perubahan mata pencaharian, serta perubahan pola hidup yang cukup drastis. Hal ini menjadi tantangan dalam proses pemulihan kehidupan sosial masyarakat pascabencana.

Perbedaan :

Penelitian Shevita & Artono (2025) berfokus pada kebijakan relokasi dan proses historisnya sedangkan penelitian saya berfokus pada kerentanan sosialnya, serta keduanya juga berfokus pada lokasi yang berbeda.

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Bencana Lumpur Lapindo

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam, sehingga menimbulkan kerugian, korban jiwa, serta dampak sosial ekonomi dan lingkungan. Dalam kajian terbaru, bencana tidak hanya dipahami sebagai peristiwa fisik, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Fajri dkk. (2024) menjelaskan bahwa bencana memerlukan penanganan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada pemulihan kondisi sosial masyarakat terdampak. Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa bencana sering kali memperlihatkan ketimpangan sosial yang sudah ada sebelumnya. Artinya, kelompok yang sudah rentan akan mengalami dampak yang lebih besar dibandingkan kelompok lainnya

Bencana Lumpur Lapindo merupakan peristiwa yang tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan lingkungan, tetapi juga menghasilkan persoalan sosial yang berlangsung dalam jangka panjang. Dalam kajian mutakhir, kasus Lapindo masih dipahami sebagai persoalan yang belum sepenuhnya selesai, terutama terkait hak atas tanah, kejelasan status wilayah terdampak, dan penyelesaian ganti kerugian bagi

masyarakat korban. Latifaturrohmah & Junarto (2023) menegaskan bahwa korban Lumpur Lapindo masih menghadapi persoalan berlarut mengenai tanah yang tertutup lumpur, pembayaran ganti rugi yang belum tuntas, dan ketidakjelasan penyelesaian hak atas tanah. Hal ini menunjukkan bahwa Lapindo bukan sekadar peristiwa masa lalu, melainkan bencana yang meninggalkan konsekuensi sosial hingga masa kini.

Selain itu, upaya pemulihan dan mitigasi yang dibahas oleh Fajri et al. (2024) memperlihatkan bahwa persoalan Lumpur Lapindo masih dipandang memerlukan pendekatan yang holistik, kolaboratif, dan berkelanjutan. Artinya, dampak Lapindo tidak dapat diselesaikan hanya melalui penanganan teknis lingkungan, tetapi juga melalui pemulihan kondisi sosial masyarakat terdampak. Dengan demikian, bencana Lumpur Lapindo layak dipahami sebagai persoalan sosial berkepanjangan yang terus memengaruhi kehidupan masyarakat Sidoarjo, termasuk warga Desa Ketapang.

a. Jenis – Jenis Bencana

1. Bencana Alam, merupakan bencana yang disebabkan oleh fenomena alam, seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, dan tsunami. Penelitian Mustofa dkk. (2022) menjelaskan bahwa kekeringan sebagai salah satu bentuk bencana alam dapat terjadi akibat perubahan iklim dan penurunan curah hujan dalam jangka waktu tertentu
2. Bencana Non Alam, bencana yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti kegagalan teknologi atau kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini, kasus Lumpur Lapindo dapat dikategorikan sebagai bencana non-alam karena dipicu oleh aktivitas industri
3. Bencana Sosial, bencana yang disebabkan oleh konflik sosial atau ketegangan dalam masyarakat. Ketiga jenis bencana ini menunjukkan bahwa bencana tidak hanya berasal dari alam, tetapi juga dapat dihasilkan dari aktivitas manusia dan dinamika sosial.

b. Dampak Bencana

Bencana memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat, mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis. Dampak fisik meliputi kerusakan infrastruktur dan lingkungan, sedangkan dampak ekonomi berupa kehilangan mata pencaharian dan menurunnya pendapatan masyarakat.

Selain itu, bencana juga menimbulkan dampak sosial, seperti terganggunya hubungan sosial, perpindahan penduduk, dan perubahan struktur komunitas. Dalam jangka panjang, dampak ini dapat memicu munculnya kerentanan sosial yang lebih besar. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa bencana dapat memperburuk kondisi kelompok rentan dan memperdalam ketimpangan sosial. Hal ini karena tidak semua kelompok memiliki kapasitas yang sama dalam menghadapi dan pulih dari bencana. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dampak bencana menjadi penting untuk melihat bagaimana suatu masyarakat dapat bertahan dan beradaptasi setelah mengalami bencana.

2.2.2 Dampak Sosial Pasca Bencana

Bencana yang berlangsung lama cenderung menimbulkan perubahan sosial yang mendalam pada masyarakat. Dampak sosial tersebut dapat berupa terganggunya kehidupan sehari-hari, menurunnya rasa aman, berkurangnya interaksi sosial, serta munculnya ketidakpastian masa depan. Dalam konteks kawasan terdampak Lapindo, persoalan yang muncul tidak hanya menyangkut kehilangan rumah atau aset ekonomi, tetapi juga menyangkut terganggunya tatanan hidup masyarakat secara lebih luas. Latifaturrohmah dan Junarto (2023) menunjukkan bahwa persoalan ganti rugi dan status tanah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menimbulkan beban sosial yang berkepanjangan bagi warga.

Hal yang serupa tampak dalam kajian penataan desa terdampak lumpur di Kabupaten Sidoarjo. Shofwan, (2023) bahwa wilayah terdampak menghadapi persoalan penataan ruang, perubahan fungsi wilayah, dan kekhawatiran masyarakat terhadap masa depan desa mereka. Ini menunjukkan bahwa dampak bencana tidak berhenti pada fase darurat, tetapi berlanjut menjadi perubahan sosial jangka panjang yang memengaruhi hubungan masyarakat dengan ruang hidup, pemerintahan desa, dan keberlangsungan komunitas.

2.2.3 Kerentanan Sosial pada Masyarakat

Kerentanan sosial dalam konteks bencana dapat dipahami sebagai kondisi ketika masyarakat mengalami kesulitan yang lebih besar untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih akibat adanya tekanan sosial, ekonomi, kelembagaan, maupun lingkungan. Pada masyarakat korban Lumpur Lapindo, kerentanan sosial tampak dari belum tuntasnya penyelesaian hak, perubahan kondisi lingkungan, serta ketidakpastian pemulihan yang dialami warga selama bertahun-tahun. Latifaturrohman dan Junarto (2023) memperlihatkan bahwa ketidakjelasan hak atas tanah dan pembayaran ganti rugi yang tidak sepenuhnya selesai telah menjadi sumber kerentanan bagi masyarakat terdampak.

Kerentanan tersebut menjadi semakin nyata ketika dilihat pada level desa. Studi Kistanti dan Mursyidah (2025) mengenai Desa Ketapang menunjukkan bahwa wilayah ini mengalami perubahan penduduk, gangguan layanan, dan persoalan administrasi desa sebagai akibat dari bencana Lumpur Lapindo. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa kerentanan sosial bukan hanya dialami pada tingkat individu atau keluarga, tetapi juga pada tingkat komunitas dan tata kelola desa. Dengan kata lain, masyarakat korban Lapindo berada dalam kondisi rentan karena harus menjalani kehidupan di tengah perubahan sosial yang belum sepenuhnya pulih.

a. Faktor Penyebab Kerentanan Sosial

Kerentanan sosial tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat, seperti tingkat kemiskinan, pendidikan, dan pekerjaan. Kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah cenderung memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya, sehingga lebih rentan terhadap tekanan sosial maupun bencana. Selain faktor ekonomi, faktor demografis seperti kepadatan penduduk, usia, dan gender juga memengaruhi tingkat kerentanan. Penelitian Nabillah et al., (2020) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kepadatan penduduk dan keterbatasan sumber daya manusia dapat meningkatkan peluang terjadinya kerentanan sosial di wilayah rawan bencana.

b. Dampak Kerentanan Sosial

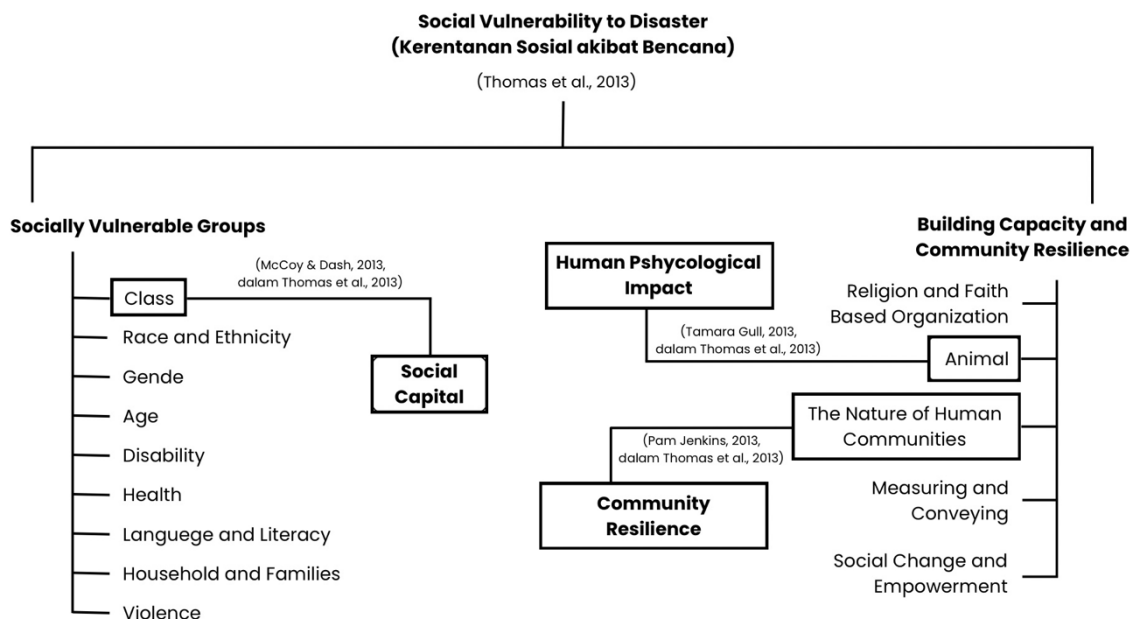
Kerentanan sosial memiliki berbagai dampak terhadap kehidupan masyarakat, baik dalam kondisi normal maupun saat terjadi krisis atau bencana. Salah satu dampak utama adalah meningkatnya risiko kerugian, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Dalam konteks bencana, masyarakat dengan tingkat kerentanan tinggi cenderung mengalami dampak yang lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Kartyasha (2024) menunjukkan bahwa kerentanan sosial berhubungan langsung dengan kemampuan masyarakat dalam menghadapi dan pulih dari bencana, di mana masyarakat yang rentan mengalami dampak sosial ekonomi yang lebih berat. Selain itu, kerentanan sosial juga dapat memperpanjang proses pemulihan pascabencana. Masyarakat yang memiliki keterbatasan sumber daya akan lebih sulit untuk kembali ke kondisi semula, sehingga kerentanan tersebut dapat berlangsung dalam jangka panjang.

c. Kerentanan dalam Konteks Bencana

Dalam kajian kebencanaan, kerentanan sosial menjadi salah satu konsep penting untuk memahami mengapa dampak bencana berbeda pada setiap kelompok masyarakat. Kerentanan sosial menentukan sejauh mana masyarakat dapat terdampak dan bagaimana mereka mampu merespons bencana. Penelitian Sudirman et al. (2023) menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat kerentanan sosial tinggi cenderung mengalami dampak bencana yang lebih besar, baik dari segi korban jiwa maupun kerugian ekonomi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko serta rendahnya kesiapsiagaan terhadap bencana. Selain itu, Mulyandari, (2025) menekankan bahwa kerentanan sosial berkaitan erat dengan tingkat kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Semakin tinggi kerentanan sosial, maka semakin rendah kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dan pulih dari bencana.



2.3 Landasan Teori



Gambar 2. 1 Dampak Kerentanan Sosial Akibat Bencana

Sumber: *Social Vulnerability to Disasters*, di olah dari Scopus A1 (Thomas et al., 2013)

Berdasarkan teori kerentanan sosial (*social vulnerability*) yang dikemukakan oleh Thomas et al., (2013), dampak bencana tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga memicu kerentanan sosial yang kompleks dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat. Dalam buku *Social Vulnerability to Disaster*; setiap chapter tidak ditulis oleh satu penulis yang sama, melainkan oleh beberapa penulis yang memiliki fokus kajian masing-masing.

Pada konteks ini, pembahasan diarahkan pada tiga aspek utama, Brenda McCoy & Nichole Dash membahas aspek *social capital* (modal sosial) yang mencerminkan kekuatan jaringan sosial, kepercayaan, dan solidaritas antarindividu dalam menghadapi serta memulihkan diri dari bencana. Pam Jenkins berkontribusi pada pembahasan mengenai *community resilience* (ketahanan komunitas) sebagai kemampuan kolektif masyarakat untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit kembali setelah bencana. Sementara Tamara Gull lebih menyoroti *human psychological impact* (dampak psikologis manusia) yang mencakup tekanan emosional, trauma, dan kondisi

mental masyarakat akibat pengalaman bencana. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi kunci dalam memahami serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana secara berkelanjutan.

1. *Inequities in Social Capital* (Ketimpangan dalam Modal Sosial).

Ketahanan komunitas pascabencana dapat dipahami melalui **teori modal sosial** (Putnam, n.d.) Hubungan dan struktur sosial memiliki nilai produktif, mirip dengan modal fisik (uang, mesin) atau modal manusia (pengetahuan, keterampilan). Modal sosial merujuk pada fitur-fitur organisasi sosial yang meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama (Aldrich, 2012)

Pada fase awal setelah terjadinya bencana, masyarakat cenderung menunjukkan solidaritas yang kuat, tercermin dari kerja sama warga dalam memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk tuntutan ganti rugi. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Putnam bahwa jaringan sosial, kepercayaan, dan norma timbal balik memungkinkan terjadinya tindakan kolektif. Namun, realitas menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, ketidakmerataan penerimaan ganti rugi justru memicu konflik dan rasa iri antarwarga. Fenomena ini memperlihatkan melemahnya kepercayaan dan hubungan sosial, sehingga modal sosial yang sebelumnya menjadi kekuatan utama pemulihan justru melemah.

Hal ini menguatkan argumen Aldrich, (2012) bahwa modal sosial merupakan faktor krusial dalam pemulihan pascabencana, tetapi juga sangat rentan melemah ketika proses pemulihan tidak dikelola secara adil dan inklusif.

Ketimpangan dalam ketahanan masyarakat pascabencana dapat dijelaskan melalui **Pressure and Release (PAR) model** dari Wisner et al. Model ini menegaskan bahwa bencana merupakan hasil dari kerentanan struktural yang telah ada sebelum peristiwa bencana terjadi (Wisner & Framework, n.d.) dalam kerangka At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters).

Realitas menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mampu menata kembali kehidupannya, sementara sebagian masih terjebak dalam kesulitan ekonomi dan sosial. Perbedaan akses terhadap ganti rugi dan sumber daya pascabencana memperlebar kesenjangan sosial, sehingga pemulihan berlangsung secara timpang. Kondisi ini mencerminkan bahwa bencana dan proses pemulihannya memperkuat tekanan struktural yang sudah ada.

2. *Community Resilience* (Ketahanan Komunitas)

Perubahan ketahanan komunitas akibat relokasi dan perpindahan warga dapat dipahami melalui pendekatan **post-disaster social disruption and community reconstruction** oleh **Anthony Oliver-Smith**, bencana mengganggu struktur sosial, kemudian mendorong memasuki fase masyarakat rekonstruksi komunitas dengan pola hubungan dan struktur baru. Bencana bertindak sebagai kekuatan perusak yang dahsyat yang menghancurkan tatanan sosial, seperti infrastruktur fisik hancur, institusi mungkin lumpuh atau tidak berfungsi, jaringan komunikasi terputus (OLIVER-SMITH, 1990).

Relokasi yang memisahkan warga dari komunitas asalnya menyebabkan menurunnya intensitas interaksi sosial dan partisipasi dalam kegiatan bersama. Kondisi ini menunjukkan terjadinya disrupsi sosial yang signifikan, di mana struktur hubungan sosial dan kohesi komunitas tidak lagi sama seperti sebelum bencana. Namun, sebagaimana dijelaskan Oliver-Smith, fase disrupsi ini diikuti oleh proses rekonstruksi sosial, meskipun dengan pola dan dinamika yang berbeda. Dengan demikian, bencana berfungsi sebagai pemicu kerentanan sosial jangka menengah dan panjang, bukan sekadar peristiwa sesaat.

3. *Psychological Impact* (Dampak Psikologi)

(Erikson, 2012), memperkenalkan **trauma kolektif** melalui studi kasus bencana banjir Buffalo Creek yang ada di Amerika Serikat pada bukunya yang berjudul *Everything in Its Path: Destruction of Community in the Buffalo Creek Flood*. Dampak traumatis dari suatu peristiwa atau tindakan yang sangat merusak

tatanan sosial fundamental, mengacu pada serangan langsung terhadap struktur dan norma-norma paling mendasar yang memungkinkan masyarakat berfungsi secara harmonis, seperti kepercayaan, keamanan, dan keadilan. Secara keseluruhan, Erikson menggunakan metafora ini untuk menjelaskan suatu kejadian (seperti perang, bencana besar, atau ketidakadilan sistemik) yang tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik atau ekonomi, tetapi juga menghancurkan fondasi psikologis dan sosiologis dari keberadaan masyarakat tersebut, membuat orang-orang merasa terasing dan sendirian. Istilah ini sering digunakan dalam konteks trauma sosial atau krisis kemanusiaan.



Tabel 2. 2 Indikasi Data Lapangan Berdasarkan Pokok Pembahasan Teori

No	Unsur : Perubahan Sosial	Indikator		Data-Data Lapangan
		Konsep	Definisi	
1.	<i>Inequities in Social Capital</i> (Ketimpangan dalam Modal Sosial)	Trust institusional	Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau lembaga terkait	Kekecewaan masyarakat pada proses ganti rugi
		Terputusnya jaringan sosial	Hubungan sosial antar individu atau kelompok	Jaringan terputus akibat relokasi
		Interaksi sosial menurun	Interaksi warga dalam kegiatan sosial dan desa menurun	interaksi masyarakat dalam kegiatan desa mengalami penurunan karena semakin sedikit warga di Desa
		Solidaritas sosial	Rasa kebersamaan dan kepedulian menghadapi kondisi tertentu	Solidaritas kuat pada awal bencana saja, sekarang melemah karena jaringan sosial yang juga menurun
		Partisipasi sosial	Keterlibatan warga dalam kegiatan sosial	Partisipasi warga dan kegiatan desa menurun
		Loyalitas	Kesetiaan seseorang terhadap kelompok, ide, atau negara	Sebagian warga tetap memilih untuk tinggal di Desa Ketapang
		Resiliensi masyarakat	Kemampuan suatu komunitas untuk bangkit dan beradaptasi dari krisis atau bencana	Muncul desa wisata sebagai adaptasi
		Norma keadilan	Pedoman perilaku dalam masyarakat guna untuk mewujudkan perlakuan yang setara	Ganti rugi dianggap tidak adil
		Gotong royong	Kegiatan kerjasama secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama	Setelah terjadi bencana masyarakat saling membantu meringankan beban sesama korban
		Individualis	Kemampuan untuk mengambil tindakan awal tanpa perlu diberi intruksi terlebih dahulu	Upaya mandiri masyarakat dalam membangun desa wisata

2.	<i>Community Resilience</i> (Ketahanan Komunitas)	Fragmentasi	Terpecahnya komunitas ke dalam kelompok terpisah	Warga tersebar akibat relokasi
		Mata pencaharian	Peralihan mata pencaharian	Peralihan mata pencaharian dari petani ke industri
		Komunikasi	Proses penyampaian informasi sosial	Komunikasi tidak seintens sebelum terjadinya bencana

		Konflik	Ketegangan antarwarga	Konflik muncul karena adanya ketimpangan dalam proses ganti rugi
		Jarak sosial	Jarak yang mengukur tingkat keakraban antar individu atau kelompok	Masyarakat tidak lagi tinggal berdekatan dan menyebabkan masyarakat jarang berinteraksi
		Regenerasi	Peran generasi muda	Anak muda cenderung meninggalkan desa dan memilih tempat yang lebih aman dan strategis
		Mobilisasi	Kemampuan untuk bergerak secara bebas dan teratur untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat	Mobilisasi warga menurun

4.	<i>Psychological Impact (Dampak Psikologi)</i>	Stres	Tekanan psikologis akibat suatu hal	Warga masih merasa tertekan
		Trauma	Dampak psikologis jangka panjang	Kejadian pada tahun 2006 masih membekas hingga sekarang
		Kecemasan	Rasa khawatir yang berlebihan	Warga masih sangat cemas terhadap apa yang terjadi di masa depan
		Ketakutan	Emosi dasar manusia terhadap suatu ancaman	Rasa takut akan terjadinya bencana serupa
		Keamanan	Kondisi bebas dari suatu bahaya, ancaman, gangguan, atau hal serupa lainnya	Masyarakat masih merasa tidak aman dan takut tanggul akan mengalami kerusakan atau lumpur meluap
		Harapan	Pandangan positif untuk masa depan	Harapan sudah mulai tumbuh jika dibandingkan setelah terjadinya bencana tahun 2006
		Emosi	Pengelolaan perasaan	Emosi masyarakat sering tidak stabil jika mengingal kejadian
		Kesedihan	Rasa kehilangan	Banyak masyarakat yang masih merasakan kesedihan akibat kehilangan aset, keluarga, dan pekerjaan
		Kejuhan	Kelelahan mental	Jenuh menghadapi ketidakpastian kapan lumpur akan berhenti menyembur
		Adaptasi	Penyesuaian psikologis	Adaptasi berjalan lambat karena banyak masyarakat yang masih belum

				Bisa menerima keadaan
		ketidakberdayaan	Rasa dimana individu merasa tidak dapat mengubah keadaan	Masyarakat sudah merasa pasrah dengan keadaan yang terjadi
		Pemulihan	Proses penyembuhan mental	Pemulihan masih belum sepenuhnya selesai karena masih banyak warga yang trauma dan mengalami khawatir yang berlebihan

